

Menteri dalam Negeri No.112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berkaitan dengan Pasal 33 ayat (1) berkaitan dengan ketentuan pemilihan kepala desa menggunakan cara toblos gambar/ foto calon dengan merubah menjadi menggunakan metode elektronik/ e-voting, dan revisi Undang-Undang Desa pada Pasal 37 ayat 6, untuk penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diberikan kewenangan kepada Lembaga Yudikatif yang sebelumnya diberikan kepada Bupati/ Walikota.

3. Dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa sebaiknya dibentuk Lembaga Pengawasan semacam Panitia Pengawasan Pemilih, supaya ada Lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara netral.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddiqi (alm) dkk., 1982/ 1983, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Departemen Agama RI., Pelita III, Tahun IV.
- Abi Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyair, tth., *Sahih Muslim*, Juz. III, Cet. I; Isa al-Babi al-Halabi.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Daud*, Dar al-Fikr., no. 4646.
- A. Hasjmy, 1984, *Dimana Letaknya Negara Islam*, tth., Cet. I; PT. Bina Ilmu.
- Abdul Mukthie Fadjdar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- Achmad, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Al-Dzahabi, 1413 H., *Tarikh al-Islam*, jilid III, cet. Dar al-Kitab al-Arabi-Beirut.

- Allan Wall, et.al, 2014, *Electoral Management Design*, Edisi Revisi, International IDEA, Stockholm, e-book.
- Al-Mawardi, 1393H./1973M., *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, Cet. I; Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby.
- Al-Suyuthi, 1425 H., *Tarikh al-Khulafa'*, cet. Maktabah Nizar Musthafa al-Baz.
- Anselmus Strauss, dan Juliet Corbin, 1979, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, New Delhi: Park London, Sage Publication.
- Asrofi, A., 2006, *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Intern terhadap Efektivitas Kerja*.
- Bagir Manan, 2000, "Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah." Makaiah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir. Bandung.
- BPPT (Badan Pengkajian Penerapan Teknologi), *E-Voting untuk Pemilu 2014*, Berita Teknologi, Informasi, Energi dan Mineral, terbit 05 Mei 2010.
- Budi Winarno, 2002, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Carol C. Gould, 1994, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Chai Podhisita, et al, tth., *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research*, Qualitative Research Methods.
- Diah Setiawaty dan Sebastian Vishnu, 2016, *Rekapitulasi Elektronik: Langkah Strategis Dalam Pengembangan Teknologi Pemilu Di Indonesia*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Edisi 9, Yayasan Perludem.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1978, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah*, Bandung: Alumni.
- Dwiyanto Indahono, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys*. Yogyakarta: Gava Media.
- Edi Priyono dan Fereshti Nurdiana, 22 Mei 2010, "E-Voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Informatika 2010, UPN "Veteran" Yogyakarta, Yogyakarta.
- Georg Sorensen, 2014, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*, terjemahan oleh Tadjuddin Noer Effendi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadar Gumay dalam Dialog Nasional "Pemanfaatan E-voting untuk Pemilu di Indonesia Tahun 2014", Rabu 19 Mei 2010 lalu di BPPT.

- Harbani Pasolong, 2010, *Teori Administrasi Publik*, Makassar: Alfabeta.
- HAW. Widjaja, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendra Nurtjahtjo, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Cet. I, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hikmahanto Juwana, Maret 2006, *Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan, Majalah Hukum* tahun XXI No. 244.
- Ibnu al-Atsir, 1417 H., *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II, Cet. Dar al-Kitab al-Arabi-Beirut.
- Ibnul Jauzi, 1434 H., *Mir'at al-Zaman*, jilid V, cet. Dar Risalah al-Alamiah-Damaskus.
- Ibrahim Hasan, 1965, *Tarikh al-Islami*, Juz. I, Cet. VII; Mesir: Maktabatu al-Nadaru.
- Ikhsan Darmawan Et. Al., 2014, *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ikhsan Darmawan, 2012, *Membongkar Problematika dalam Pemilukada*, Jakarta: Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik FISIP UI, e-book.
- Imam Ath-Thabari, 1387 H., *Tarikh a-Thabari*, jilid IV, Cet. Dar al-Turats-Beirut.
- Josep Riwu Kaho, 1982, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartini Kartono, 2003, *Pemimpin dan Kepemimpinan apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartohadikoesomo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Kersting dan Baldersheim, dalam Ikhsan Darmawan Et. Al., 2014, *Memahami E-voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kertapraja E. Koswara, 2002, *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta: Candi Cipta Paramuda.
- M. Sidi Ritauddin, Tulisan Ilmiah dengan judul “*Karakteristik Ulil Amri Dalam Format Etika Politik Islam Perspektif Al-Quran*”, Bandar Lampung: Jurnal Tapis, Vol. 1, 2005.
- Marzan A. Iskandar, 12-13 November 2014, “*Inovasi Dan Difusi TIK Untuk Pembangunan Demokrasi: Pemilu Elektronik*”, Disampaikan dalam Dialog Nasional TIK, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tangerang.

- Mashuri Maschab, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Pol-Gov.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, Dr., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana KONSEPsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddiqi, 1971, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahardjo Adisasmita. 2011, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Mamudji et al. 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suryaningrat Bayu, 1980, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisis*, Jakarta: Dewa Ruci Press.
- Susanne Caarls, 2010, *E-voting Handbook: Key Steps in the Implementation of e-enabled Elections*, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
- Suyuti Pulungan, 1999, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Syarif Saleh, Wajong. J, 1987, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta.
- The Liang Gie, 1995, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, I, II, dan III*. Yogyakarta: Liberty.
- W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN. Balai Pustaka.

Widjaja Gunawan, 2008, *Peran Peradilan dalam Menyelesaikan Sengketa oleh Arbitrase*, Jakarta: Kencana.

William J. Filstead, 1979, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London: Sage Publications.

Winarno, 2014, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Cet. II, Edisi ke-3, Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Suara

Peraturan Desa Nomor 141/1/BPD Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Taman

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Taman

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Desa Taman

Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Taman Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Suara.

Internet

Hadar Gumay dalam Dialog Nasional “*Pemanfaatan E-voting untuk Pemilu di Indonesia Tahun 2014*”, Rabu 19 Mei 2010 lalu di BPPT.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/03/tak-serumit-yang-dibayangkanbegini-serunya-menjal-e-voting-di-pilkades-babakan>, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.26 WIB.

<https://metro.sindonews.com/read/1187726/170/pertama-kali-desa-babakanterapkan-e-voting-untuk-pemilihan-kepala-desa-1489340756>, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.27 WIB.

<https://www.jawapos.com/read/2017/03/13/115814/cerita-tentang-pilkades-dibogor-yang-berbasis-e-voting>, diakses pada 15 September 2017 pukul 17.35 WIB.

<https://metro.sindonews.com/read/1187726/170/pertama-kali-desa-babakanterapkan-e-voting-untuk-pemilihan-kepala-desa-1489340756>, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.27 WIB.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/03/tak-serumit-yang-dibayangkanbegini-serunya-menjal-e-voting-di-pilkades-babakan>, diakses pada 15 November 2017 pukul 20.26 WIB.

<https://www.bawaslu.go.id//>, 11 Desember 2014

*Semangat Warga Boyolali Gelar Pilkades dengan Teknologi E-voting Semangat
Warga Boyolali Gelar Pilkades dengan Teknologi E-voting,*
liputan6.com, edisi 29 Juni 2019

beritasatu.com, tanggal 24 Juli 2013

detik.com, tanggal 23 Agustus 2019